



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 129, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan yang sangat kompleks, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana orang secara terpadu perlu menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan tindak pidana orang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
6. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang Undang.
7. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang selanjutnya disebut GT P2TPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Kota Tangerang Selatan.
8. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO selanjutnya disingkat RAD P2TPPO adalah rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan TPPO Kota Tangerang Selatan Tahun 2022-2026 sebagai dokumen operasional yang mengoordinasikan GT P2TPPO dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 2

RAD P2TPPO disusun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi GT P2TPPO dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan TPPO.

Pasal 3

- (1) Isi RAD P2TPPO meliputi:
 - a. pencegahan dan partisipasi anak;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi;
 - d. pengembangan norma hukum;
 - e. penegakan hukum; dan
 - f. koordinasi dan kerja sama.
- (2) Isi RAD P2TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III GUGUS TUGAS

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah dilaksanakan melalui GT P2TPPO.
- (2) GT P2TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak;
 - b. Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan;
 - c. Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi;
 - d. Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum;
 - e. Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum; dan
 - f. Sub GT P2TPPO Koordinasi dan Kerja Sama.
- (3) GT P2TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak untuk membahas berbagai permasalahan perdagangan anak dan eksploitasi anak yang terjadi, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing masing anggota;
 - b. menyusun, mencetak, dan menyebarkan media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
 - c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan pencegahan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
 - d. mendorong terintegrasinya isu tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak ke dalam proses pembelajaran dalam pendidikan formal dan nonformal;
 - e. membangun mekanisme pengawasan dan perlindungan berbasis komunitas terhadap tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak;
 - f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub GT P2TPPO Pencegahan dan Partisipasi Anak;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak; dan
 - h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan partisipasi anak kepada Ketua Harian GT P2TPPO.

- (2) Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Kesehatan untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan rehabilitasi kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO;
 - e. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan kesehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - f. menyusun dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan semua layanan rehabilitasi kesehatan termasuk layanan bagi korban TPPO;
 - g. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub GT P2TPPO Rehabilitasi;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi kesehatan; dan
 - i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi kesehatan kepada Ketua Harian GT P2TPPO.
- (3) Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. mengkoordinasikan dengan jajaran terkait dalam rangka pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi yang aman bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - c. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana rehabilitasi sosial dalam penanganan saksi dan/atau korban TPPO termasuk membangun rumah aman dan trauma *center* bagi korban TPPO sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. menyusun dan mengharmonisasi standar pelayanan rehabilitasi sosial bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - e. menyusun, memperbaiki, dan mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan di semua layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO;
 - f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi bagi korban TPPO;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi; dan
 - h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi kepada Ketua Harian GT P2TPPO.

- (4) Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Pengembangan Norma Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas produk hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. melakukan *review* dan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan TPPO;
 - c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di Daerah terkait dengan TPPO;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan norma hukum; dan
 - e. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas pengembangan norma hukum pada Ketua Harian GT P2TPPO.
- (5) Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Penegakan Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas layanan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan penegakan hukum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan penegakan hukum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. mengembangkan dan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - e. mengimplementasikan Standar Pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - f. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan, dan pelaporan di semua layanan penegakan hukum;
 - g. mengefektifkan kegiatan layanan bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban TPPO;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum; dan
 - i. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan hukum kepada Ketua Harian GT P2TPPO.
- (6) Sub GT P2TPPO Koordinasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f mempunyai tugas:
- a. melakukan pertemuan koordinasi dengan para anggota Sub GT P2TPPO Kerja Sama dan Koordinasi untuk membahas berbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas kerja sama layanan pencegahan dan penanganan TPPO, termasuk penyediaan anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing anggota;
 - b. membangun dan mengembangkan kerja sama;
 - c. mendorong dan memfasilitasi kerja sama terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
 - d. mendorong pembentukan dan penguatan GT P2TPPO;
 - e. meningkatkan kapasitas anggota GT P2TPPO;
 - f. membentuk kesekretariatan GT P2TPPO;
 - g. melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan penganggaran pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;

- h. membangun dan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga sosial masyarakat dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama; dan
- j. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan kerja sama kepada Ketua Harian GT P2TPPO.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan RAD P2TPPO bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Desember 2022
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 129

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 8 Februari 2023

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 127 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

| No | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2021 | Target dan Waktu | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (Perangkat Daerah) |
|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| A. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perlindungan Perempuan | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif b. Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pelatihan pencegahan kekerasan terhadap c. Jumlah Peserta yang mengikuti pelatihan mediator/KtPA/hipnoterapi bersertifikat | 100,00% | 100,00% | 584.785.000 | 100,00% | 43.655.805 | 100,00% | 491.209.291 | 100,00% | 506.362.759 | 100,00% | 541.594.542 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| 2 | Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | a. Persentase OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender b. Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat bimbingan PUG dan PPRG c. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG | 32,43% | 37,84% | 557.088.690 | 43,24% | 441.705.885 | 48,65% | 467.944.870 | 54,05% | 482.285.382 | 54,05% | 515.943.798 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| 3 | Peningkatan Kualitas Keluarga | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | a. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 1) Jumlah keluarga dibina/ didampingi dalam peningkatan kualitas keluarga 2) Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak 1) Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 2) Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 100KK | 100KK | 730.000.000 | 100KK | 557.071.403 | 100KK | 596.396.767 | 100KK | 617.889.438 | 100KK | 668.334.586 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| 4 | Pendidikan dan latihan pengkoperasian | Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah) | Jumlah SDM koperasi yang meningkat pemahaman dan pengetahuan perkeroperasian | 1300 SDM | 2000 SDM | 500.000.000 | 2200 SDM | 1.381.555.033 | 2300 SDM | 1.452.256.791 | 2400 SDM | 1.488.150.186 | 2500 SDM | 1.580.136.060 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 5 | Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan | Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,serta Desain dan Teknologi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah) | Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pendataan, kemitraan, perizinan dan kelembagaan | 0 | 15430 UMKM | 1.382.000.000 | 22430 UMKM | 1.480.237.535 | 22430 UMKM | 1.555.989.419 | 22430 UMKM | 1.594.446.628 | 3500 UMKM | 1.693.002.922 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 6 | Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | a. Jumlah wisatawan mancanegara b. Jumlah wisatawan Nusantara c. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata | 8,882 Orang | 9,326 Orang | 1,459,859,000 | 9,792 Orang | 1,400,084,584 | 10,282 Orang | 1,463,805,150 | 10,796 Orang | 1,499,453,672 | 11,336 Orang | 1,580,804,266 | Dinas Pariwisata |
| 7 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | a. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa b. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 7 -12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI) Terseleenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 105.08 % | 105.4 % | 27,271,485 ,144 | 105.62 % | 41,444, 371,742 | 105.80 % | 42,451,44 7,525 | 105.99 % | 44,853,40 0,556 | 106.17 % | 47,496,99 6,888 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | a. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa b. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/ MTs) Terseleenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 93.68 % | 95.26 % | 36,361,980 ,192 | 96.05 % | 55,259, 162,323 | 96.86 % | 56,601,93 0,034 | 97.67 % | 59,804,53 4,075 | 98.49 % | 63,329,32 9,184 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Pengelolaan Pendidikan | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | a. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD b. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terseleenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 37.48 % | 37.52 % | 13,635,742 ,572 | 37.55 % | 20,722, 185,871 | 37.57 % | 21,225,72 3,763 | 37.59 % | 22,426,70 0,278 | 37.62 % | 23,748,49 8,44 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | | | 721 Lembaga | 721 Lembaga | 23,425,939 ,112 | 721 Lembaga | 36,782, 093,289 | 721 Lembaga | 39,230,31 6,344 | 721 Lembaga | 41,949,63 5,079 | 721 Lembaga | 44,982,94 6,459 | |

| No | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2021 | Target dan Waktu | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (Perangkat Daerah) | | |
|---|---|---|---|---|--|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 10 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | a. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan | Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, dan C) | 1,79 | 1,8 | 13,635,742 ,572 | 1,8 | 20,722, 185,871 | 1,81 | 21,225,72 3,763 | 1,81 | 22,426,70 0,278 | 1,81 | 23,748,49 8,44 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | | |
| | | | b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 12 Bulan | 12 Bulan | 8,439,523, 670 | 12 Bulan | 17,766, 061,237 | 12 Bulan | 18,864,06 0,545 | 12 Bulan | 20,058,28 7,647 | 12 Bulan | 21,358,09 3,875 | | | |
| 11 | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Kab/Kota | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Pengadaan Kelengkapan Regulasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) | N/A | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | 100% | 200.000.000 | Dinas Perhubungan | | |
| 12 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja peerangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Bappeda | 16 | 16 | 400.000.000 | 16 | 250.000.000 | 16 | 391.708.124 | 16 | 370.000.000 | 16 | 400.000.000 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | |
| 13 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 4 | 2 | 800.000.000 | 2 | 641.435.580 | 2 | 739.978.190 | 2 | 739.978.190 | 2 | 683.434.469 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | | |
| 14 | Perencanaan Tenaga Kerja | Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | 1) Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | 100 % | 100 % | 80.000.000 | 100 % | 51.897.010 | 100 % | 54.861.045 | 100 % | 60.490.491 | 100 % | 60.490.491 | Dinas Tenaga Kerja | | |
| | | | b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | 2) Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro | NA | 1 Dokumen | 80.000.000 | 1 Dokumen | 51.897.010 | 1 Dokumen | 54.861.045 | 1 Dokumen | 60.490.491 | 1 Dokumen | 60.490.491 | | | |
| 15 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 1) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | a) Jumlah Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi | 4.700 Orang | 1.500 Orang | 1.224.000.000 | 1.500 Orang | 794.024.246 | 1.500 Orang | 839.420.340 | 1.500 Orang | 869.973.981 | 1.500 Orang | 925.504.517 | Dinas Tenaga Kerja | | |
| | | | | b) Presentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang terdaftar dan berizin | 24% | 35% | 306.000.000 | 40% | 198.506.062 | 45% | 209.855.085 | 50% | 217.493.495 | 55% | 231.376. 129 | | | |
| | | | | c) Jumlah Orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster | 220 Orang | 149 Orang | 900.000.000 | 100 Orang | 400.000.000 | 110 Orang | 430.000.000 | 120 Orang | 450.000.000 | 130 Orang | 500.000.000 | | | |
| | | | 2) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | Jumlah Lembaga yang berkoordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 20 Lembaga | 20 Lembaga | 100.000.000 | 20 Lembaga | 70.000. 000 | 20 Lembaga | 70.000. 000 | 20 Lembaga | 70.000. 000 | 20 Lembaga | 70.000. 000 | | 20 Lembaga | 70.000. 000 |
| | | | | 3) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja | Tersedia sarana pelatihan kerja | Paket | NA | NA | 1 Paket | 100.000.000 | 1 Paket | 100.000.000 | 1 Paket | 100.000.000 | 1 Paket | | 100.000.000 | |
| | | | | b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | 1) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang mendapat pembinaan | 50 Lembaga | 20 Lembaga | 80.000.000 | 20 Lembaga | 64.000.000 | 20 Lembaga | 69.500.000 | 20 Lembaga | 73.500. 000 | | 20 Lembaga | 80.500.000 |
| c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | 2) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi | Cakupan fasilitasi perizinan lembaga pelatihan | 100% | | 100% | 80.000. 000 | 100% | 64.506.062 | 100% | 70.355. 085 | 100% | 73.993.493 | 100% | 80.876.129 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Program Penempatan Tenaga Kerja | a. Pelayanan Antarkerja di Kota | 1) Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | a) Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/ kota | 50% | 10% | 616.693. 200 | 10% | 514.769 .811 | 10% | 544.200.321 | 10% | 564.008.396 | 10% | 600.009.115 | Dinas Tenaga Kerja | | |
| | | | | b) Presentase Tenaga Kerja lokal yang ditempatkan | 4% | 5% | 411.128. 800 | 10% | 343.179 .874 | 15% | 362.800. 214 | 20% | 376.005. 597 | 25% | 400.006.076 | | | |
| | | | | c) Jumlah petugas pelayanan antar kerja | 50 Orang | 50 Orang | 50.000. 000 | 50 Orang | 50.000.000 | 50 Orang | 50.000 000 | 50 Orang | 50.000.000 | 50 Orang | 50.000. 000 | | | |
| | | | 2) Pelayanan antar Kerja | Cakupan pelayanan penerbitan kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja | 100% | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000. 000 | 100% | 50.000.000 | 100% | 50.000. 000 | 100% | 50.000. 000 | | | |
| | | | 3) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | Jumlah pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan | 50 Orang | 50 Orang | 50.000.000 | 50 Orang | 50.000. 000 | 50 Orang | 50.000. 000 | 50 Orang | 50.000. 000 | 50 Orang | 50.000. 000 | | | |
| | | b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Kota | c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | 4) Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | Jumlah Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | 0 Pelayanan | 1 Pelayan an | 50.000.000 | 1 Pelayan an | 50.000.000 | 1 Pelayan an | 50.000.000 | 1 Pelayan an | 50.000.000 | 1 Pelayan an | | 50.000.000 | |
| | | | | 5) Perluasan Kesempatan Kerja | Jumlah orang yang dilatih | 0 Orang | 20 Orang | 100.000.000 | 30 Orang | 50.000. 000 | 40 Orang | 70.000. 000 | 50 Orang | 70.000.000 | 60 Orang | | 50.000. 000 | |
| | | | | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Kota | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | Cakupan penerbitan Surat Izin Usaha LPTKS | 100,00% | 100 % | 110.000.000 | 100 % | 110.000.000 | 100 % | 110.000.000 | 100 % | 130.000.000 | | 100 % | 140.000.000 |
| | | | | 1) Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah sistem informasi ketenagakerjaan berupa aplikasi informasi pasar kerja online | 1 Sistem | 1 Sistem | 30.000.000 | 1 Sistem | 50.000.000 | 1 Sistem | 50.000 000 | 1 Sistem | 60.000. 000 | 1 Sistem | | 60.000.000 | |
| | | | | 2) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah layanan informasi pasar kerja online | 1 Sistem | 1 Sistem | 30.000. 000 | 1 Sistem | 50.000.000 | 1 Sistem | 50.000. 000 | 1 Sistem | 50.013.993 | 1 Sistem | | 50.015.191 | |
| 3) Penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja | Jumlah event Job Fair/Bursa Kerja yang dilaksanakan | 1 Event | 1 Event | 77.822.000 | 1 Event | 100.000. 000 | 1 Event | 127.000. 535 | 1 Event | 130.000. 000 | 1 Event | 130.000.dd000 | | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2021 | Target dan Waktu | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (Perangkat Daerah) |
|--|--|--|---|---|---|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 17 | Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | Presentase Perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LK+S Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 10% | 11% | 507.688.800 | 13% | 507.688.800 | 15% | 267.325.752 | 17% | 277.056.008 | 20% | 294.740.524 | Dinas Tenaga Kerja |
| | | | | Jumlah pengesahan peraturan perusahaan & Perjanjian Kerja Sama | 31 Perusahaan | 37 Perusahaan | 137.778.800 | 47 Perusahaan | 50.000.000 | 57 Perusahaan | 53.000.000 | 67 Perusahaan | 55.000.000 | 77 Perusahaan | 57.000.000 | |
| | | | 2) Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan | Jumlah pengesahan peraturan perusahaan & Perjanjian Kerja Sama | 31 Perusahaan | 37 Perusahaan | 137.778.800 | 47 Perusahaan | 50.000.000 | 57 Perusahaan | 53.000.000 | 67 Perusahaan | 55.000.000 | 77 Perusahaan | 57.000.000 | |
| | | 3) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | Jumlah data dan Informasi sarana Hubungan Industrial & Jamsostek | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 369.910.000 | 1 Dokumen | 202.868.698 | 1 Dokumen | 214.325.752 | 1 Dokumen | 222.056.008 | 1 Dokumen | 237.740.524 | | |
| | | b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan perselisihan hubungan industrial Mogok Kerja yang terfasilitasi | 100% | 100% | 135.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 32.000.000 | |
| | | | | 2) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan kasus perselisihan yang diselesaikan | 100% | 100% | 170.000.000 | 100% | 36.500.000 | 100% | 38.000.000 | 100% | 38.000.000 | 100% | |
| | | | 3) Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi | Jumlah Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi yang terverifikasi | 6 Organisasi | 6 Organisasi | 160.000.000 | 6 Organisasi | 45.000.000 | 6 Organisasi | 50.000.000 | 6 Organisasi | 50.000.000 | 6 Organisasi | 55.000.000 | |
| | | | 4) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit yang dilaksanakan | 12 Bulan | 12 Bulan | 510.000.000 | 12 Bulan | 250.000.000 | 12 Bulan | 260.000.000 | 12 Bulan | 275.854.012 | 12 Bulan | 278.110.786 | |
| | | | 5) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | Jumlah pekerja yang terfasilitasi jaminan sosial & Kesejahteraan Pekerja | 0 Peserta | 62500 Peserta | 250.000.000 | 67500 Peserta | 27.000.000 | 68000 Peserta | 27.988.628.628 | 68500 Peserta | 27.000.000 | 69000 peserta | 32.000.000 | |
| | | 18 | Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1) Persentase Anak Yang Memiliki KIA | 37,70% | 49,7 6% | 521.890.000 | 61,83% | 476.438.036 | 73,19% | 385.225.220 | 83,91 % | ddd | |
| 2) Persentase Penduduk Memiliki KTP | 89,9 1% | | | | | 91,5 5% | 521.890.000 | 93,16% | 552.213.327 | 94,74% | 385.225.520 | 96,21 % | 7.864.191.626 | 98,00% | 645.256.552 | |
| 3) Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | NA | | | | | 12 Bulan | 140.500.000 | 12 | 1.015.000.000 | 12 | 1.015.000.000 | 12 | 5.125.000.000 | 12 | 1.025.000.000 | |
| 4) Terlaksananya pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi | 7 Kecamatan | | | | | 7 kecamatan | 50.500.000 | 7 | 80.000.000 | 7 | 80.000.000 | 7 | 90.000.000 | 7 | 90.000.000 | |
| b. Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Terlaksananya pelayanan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan | | | | 12 Bulan | 3 Bulan | 25.000.000 | 12 Bulan | 35.000.000 | 12 Bulan | 35.000.000 | 12 Bulan | 35.000.000 | 12 Bulan | 35.000.000 | |
| 19 | Program Pencatatan Sipil | a. Pelayanan Pencatatan Sipil | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 1) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | - | 54,56% | n/a | 57,18% | 476.458.026 | 59,79% | 504.941.446 | 62,41% | 519.925.118 | 65,02% | 556.737.120 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | | 2) Terlaksananya Pelayanan Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas | 12 Bulan | 3 Bulan | 25.000.000 | 12 Bulan | 380.000.000 | 12 Bulan | 380.000.000 | 12 Bulan | 880.000.000 | 12 | 380.000.000 | |
| | | b. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Perkawinan di Luar Kantor | 600 Akta | 150 akta | 25.000.000 | 600 akta | 350.000.000 | 600 akta | 350.000.000 | 600 akta | 350.000.000 | 600 akta | 350.000.000 | |

| No | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2021 | Target dan Waktu | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (Perangkat Daerah) |
|---|--|--|---|---|------------------------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap a. Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Persentase pemuda yang dibina (Jumlah pemuda yang dibina dibagi Total jumlah pemuda dikali 100%) | 0,15 | 0.15% | 2,284,000,000.00 | 0.18% | 2,433,004,721 | 0.20% | 2,497,128,184 | 0.23% | 2,599,470,685 | 0.25% | 2,759,650,582 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap b. Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah pemuda yang dibina | 468 | 650 org | 2,284,000,000 | 750 org | 2,433,004,721 | 850 org | 2,497,128,184 | 950 org | 2,599,470,685 | 1050 org | 2,759,650,582 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga |
| | | | 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6) Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | a. Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani | 100% | 100% | 1,155,625,000 | 100% | 2,213,168,246 | 100% | 2,280,948,182 | 100% | 2,324,973,178 | 100% | 2,460,855,322 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | b. Cakupan pencegahan gangguan tranribum yang dilaksanakan | - | 100% | 467,158,000 | 100% | 850,500,000 | 100% | 970,880,000 | 100% | 975,890,000 | 100% | 1,027,000,000 | |
| 22 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota | 100% | 100% | 6.718.361.000 | 100% | 6.844.464.953 | 100% | 7.288.841.286 | 100% | 7.409.226.104 | 100% | 8.036.879.337 | Dinas Komunikasi dan Informatika |

| No | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2021 | Target dan Waktu | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (Perangkat Daerah) |
|--|---|---|--|--|---|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| B. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | a. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah dengan ketersediaan sarana prasarana dan perbekalan kesehatan sesuai standar | 81,6 % | 85 % | 118.745.402.159 | 90 % | 127.121.454.966 | 92 % | 132.638.525.558 | 95 % | 135.469.482.142 | 97 % | 142.589.266.159 | Dinas Kesehatan |
| | | | | b. Jumlah Puskesmas yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan | 12 Puskesmas | 12 Puskesmas | 506,726,000 | 12 Puskesmas | 542,469,000 | 12 Puskesmas | 566,012,000 | 12 Puskesmas | 578,093,000 | 12 Puskesmas | 608,475,000 | |
| | | | | c. Jumlah Fasyankes Pemda dengan ketersediaan Alat kesehatan/ Alat Penunjang Medik sesuai standar | 31 Fasyankes | 35 Fasyankes | 2,471,438,108 | 35 Fasyankes | 2,913,714,000 | 35 Fasyankes | 2,594,509,000 | 35 Fasyankes | 2,725,851,107 | 35 Fasyankes | 2,898,017,308 | |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | a. Rasio dokter per 100.000 penduduk | 146,9 | 148,4 | 35.424.029.996 | 150 | 37.922.767.130 | 151 | 39.568.615.056 | 153 | 40.413.143.680 | 154 | 42.537.111.750 | Dinas Kesehatan |
| | | | | b. Jumlah tenaga kesehatan pada Faskes Pemerintah Daerah yang dilatih berdasarkan kompetensinya | 620 orang | 200 orang | 7,084,805,999 | 250 orang | 7,584,553,426 | 300 orang | 7,913,723,011 | 300 orang | 8,082,628,736 | 300 orang | 8,507,422,350 | |
| C. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi dan Pemulangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perlindungan Perempuan | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | 100% | 100% | 584.785.000 | 100% | 463.665.805 | 100% | 491.209.291 | 100% | 506.262.759 | 100% | 541.594.542 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | | | | b. Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 238.470.199 | 100% | 252.141.431 | 100% | 267.194.899 | 100% | 267.194.899 | |
| | | | | c. Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pelayanan | 100% | 100% | 250.000.000 | 100% | 238.470.199 | 100% | 252.141.431 | 100% | 267.194.899 | 100% | 267.194.899 | |
| 2 | Perlindungan Khusus Anak | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (APBD) | 1) Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan | 100% | 100% | 350.000.000 | 100% | 249.755.456 | 100% | 269.227.854 | 100% | 279.870.192 | 100% | 279.870.192 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| | | | | 2) Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan | 100% | 100% | 350.000.000 | 100% | 249.755.456 | 100% | 269.227.854 | 100% | 279.870.192 | 100% | 279.870.192 | |
| | | | | Cakupan korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan | 100% | 100% | 350.000.000 | 100% | 249.755.456 | 100% | 269.227.854 | 100% | 279.870.192 | 100% | 279.870.192 | |
| 3 | Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial | a. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 1) Persentase PPKS yang ditangani | 1.265 Org | 1 | 4.169.000.000 | 1 | 4.585.900.000 | 1 | 5.044.490.000 | 1 | 5.548.938.000 | 1 | 6.103.829.000 | Dinas Sosial |
| | | | | 2) Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 47 Org | 1 | 2.271.500.000 | 1 | 2.498.650.000 | 1 | 2.748.515.000 | 1 | 3.023.366.000 | 1 | 3.325.701.000 | |
| | | | | 3) Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga | 47 Org | 10% | 242.000.000 | 10% | 266.200.000 | 10% | 292.820.000 | 10% | 322.102.000 | 10% | 354.312.000 | |
| | | | | b. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial | Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan bimbingan sosial fisik, mental, spritual, dan sosial | 100% | 100% | 363.000.000 | 100% | 399.300.000 | 100% | 439.230.000 | 100% | 483.153.000 | 100% | |
| c. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza | Persentase PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Napza yang mendapatkan bimbingan sosial | 30 Org | 100% | 275.000.000 | 100% | 302.500.000 | 100% | 332.750.000 | 100% | 366.025.000 | 100% | 402.627.000 | | | | |
| D. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | a. Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani | 100% | 100% | 1,155,625,000 | 100% | 2,213,168,246 | 100% | 2,280,948,182 | 100% | 2,324,973,178 | 100% | 2,460,855,322 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | b. Cakupan pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan | 100% | 100% | 467,158,000 | 100% | 850,500,000 | 100% | 970,880,000 | 100% | 975,890,000 | 100% | 1,027,000,000 | |
| | | | | c. Jumlah dokumen SOP yang disusun | 100% | 100% | 15,000,000 | 100% | 68,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 70,000,000 | 100% | 70,000,000 | |

| No | Program | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2021 | Target dan Waktu | | | | | | | | | | Penanggung Jawab (Perangkat Daerah) |
|---|--|--|---|---|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | |
| | | | | | | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | 1) Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani | 100% | 100% | 1,155,625,000 | 100% | 2,213,168,246 | 100% | 2,280,948,182 | 100% | 2,324,973,178 | 100% | 2,460,855,322 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 2) Cakupan pencegahan gangguan trantibum yang dilaksanakan | N/A | 100% | 467,158,000 | 100% | 850,500,000 | 100% | 970,880,000 | 100% | 975,890,000 | 100% | 1,027,000,000 | |
| | | | | 3) Cakupan Penertiban Kejadian Insidental | N/A | 100% | 450,107,500 | 100% | 750,500,000 | 100% | 880,000,000 | 100% | 885,000,000 | 100% | 939,000,000 | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum | N/A | 700% | 48,359,500 | 700% | 85,000,246 | 700% | 95,900,182 | 700% | 96,900,178 | 700% | 99,900,322 | |
| 2 | Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 1) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | 100% | 100% | 312,280,000 | 100% | 1,844,306,871 | 100% | 1,900,790,152 | 100% | 1,937,477,648 | 100% | 2,050,712,769 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | 2) Jumlah sosialisasi penegakan Perda dan Perkada yang dilakukan | N/A | 4 | 20,000,000 | 8 | 285,000,000 | 12 | 285,000,000 | 16 | 285,000,000 | 20 | 285,000,000 | |
| | | | | Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | N/A | 118 | 122,150,000 | 210 | 514,000,000 | 302 | 514,000,000 | 394 | 514,000,000 | 486 | 514,000,000 | |
| | | | | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | N/A | 100% | 125,130,000 | 100% | 750,306,871 | 100% | 750,790,152 | 100% | 751,477,648 | 100% | 751,712,769 | |
| F. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Perlindungan Khusus Anak | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi/Sinkronisasi Program antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak | N/A | 2 Kegiatan | 19.634.000 | 2 Kegiatan | 34.251.000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana |
| 2 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 1) Persentase pos pelayanan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang aktif | 100% | 100% | 4.836.042.000 | 100% | 5.177.166.308 | 100% | 5.401.855.303 | 100% | 5.517.149.241 | 100% | 5.807.110.569 | Dinas Kesehatan |
| | | | | 2) Jumlah Mitra Potensial yang melakukan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan | 18 Mitra Potensial | 25 Mitra Potensial | 96.721.000 | 30 Mitra Potensial | 103.544.000 | 35 Mitra Potensial | 108.038.000 | 40 Mitra Potensial | 110.343.000 | 45 Mitra Potensial | 116.143.000 | |
| 3 | Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase gangguan kamtrantibum yang ditangani | 100% | 100% | 1,155,625,000 | 100% | 2,213,168,246 | 100% | 2,280,948,182 | 100% | 2,324,973,178 | 100% | 2,460,855,322 | Satuan Polisi Pamong Praja |
| | | | | Cakupan pencegahan gangguan kamtrantibum yang dilaksanakan | N/A | 100% | 467,158,000 | 100% | 850,500,000 | 100% | 970,880,000 | 100% | 975,890,000 | 100% | 1,027,000,000 | |
| | | | | Persentase terlaksananya koordinasi dan rapat teknis antar Lembaga dan Kemitraan yang dilakukan | N/A | 100% | 24,000,000 | 100% | 54,168,000 | 100% | 74,168,000 | 100% | 76,183,000 | 100% | 79,955,000 | |

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Cipta, 8 Februari 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani